





mengalami perubahan, tetapi juga ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan cepat, seperti tiga bulan setelah merdeka sudah terjadi perubahan yang mendasar yaitu perubahan UUD yang pada hakekatnya menimpang dari UUD '45, yaitu dalam rapatnya tanggal 16 Oktober 1945 KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) mengusulkan agar komite tersebut disertai sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN serta pemerintah menyetujui dibentuknya badan pekerja KNIP untuk menjalankan tugasnya yang baru tersebut. Dan akhirnya atas dasar rapat tersebut wakil presiden Moh Hatta atas nama presiden mengeluarkan maklumat pemerintah No. X tahun 1945 yang berisi :

"Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya kesdaan dijalankan oleh sebuah badan yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat".

Keluarnya maklumat ini merupakan praktek ketatanegaraan yang tanpa ada konstitusi (Undang-undang)nya. Karena Komite Nasional Pusat menurut aturan peralihan KNIP adalah pembantu presiden bukan pengganti DPR/MPR. (Moh. Mahfud MD. , 1993; 47)

Kedadaan negara yang masih kacau dan militer yang baru terbentuk menjadikan negara Indonesia banyak menghadapi ancaman-ancaman baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Yang

datang dari dalam negeri diawal kemerdekaan itu adalah pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948 dibawah pimpinan Muso yang baru datang dari Moskow. Disini peran ABRI sudah teruji dan sangat dibutuhkan sebagai kekuatan hankam negara. Pemberontakan PKI di Madiun ini ternyata juga melibatkan personil tentara (perwira) yang akhirnya oleh presiden Soekarno dipecat dari anggota tentara karena dianggap berkhianat. ( A. H. Nasution, 1983; 47). Bahkan sebelum pemberontakan PKI Madiun ini, angkatan perang Indonesia sudah harus berhadapan dengan Agresi militer Belanda yang pertama pada 21 juli 1947 dan baru pada tanggal 5 Agustus 1947 diadakan gencatan senjata. Dan pada tahun 1948, setelah penumpasan pemberontakan PKI, sudah harus menghadapi pihak Belanda lagi yang melancarkan serangan militernya yang kedua dengan menyerang dan menduduki ibukota Republik Indonesia Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948.

Agresi militer Belanda kedua ini menyebabkan dimulainya perang gerilya yang berlarut-larut dan berlakunya PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Sumatra. Sehingga Kolonel A.H. Nasution selaku panglima komando Jawa menyatakan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa dengan tujuan menyelamatkan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya instruksi MBKD No. 1/MBKD/1948 yang menetapkan tiga

landasan perjuangan yaitu : 1. Republik harus tetap berjuang sebagai negara, 2. Pemerintahan harus berjalan terus, 3. Pemerintahan militer adalah satu-satunya alat perjuangan dengan susunan : a. Panglima Besar Angkatan Perang (PBAP) sebagai pimpinan tinggi, b. Panglima Tentara Teritorial Jawa (PTTD) untuk memimpin di Jawa dan Madura, c. Gubernur Militer (GM) untuk propinsi, d. Komando Militer Daerah (KMD) untuk karisidenan, e. Komando Distrik Militer (KDM) untuk kabupaten dan, f. Komando Order Distrik Militer (KODM) untuk kecamatan. Dan pemerintahan ini berakhir dengan persetujuan Rum - Royen pada tanggal 7 Mei 1949. (Soebijono Cs., 1995: 17-18)

Peristiwa 19 Desember 1948 (agresi militer kedua) ini memang mempunyai eksese (dampak) bagi 25 tahun kedepan perkembangan kepemimpinan Republik Indonesia yaitu putusan kabinet yang menetapkan untuk tetap tinggal didalam kota dibawah pimpinan Soekarno - Hatta dengan menunggu apa yang terjadi dan tidak melibatkan diri dalam perlawanan rakyatbersenjata. (A. H. Nasution, 1983: 69). Hal ini yang menyebabkan militer mengambil alih pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas.

Selesai menumpas pemberontakan PKI di Madiun dan agresi militer Belanda pertama dan kedua, militer Indonesia harus berhadapan dengan pemberontakan di

daerah-daerah seperti APRIS pada tahun 1950 (1-4-1950) yang disusul dengan pemberontakan RMS dibawah pimpinan Soumokil dan Manusaha pada tahun 1950 (25-4-1950) dan pemberontakan Kahar Muzakar sejak tahun 1951. (R.Z. Leiressa, 1997: 27). Dan dalam keadaan semacam itulah lahir Sapta Marga (5 Oktober 1951) yang merupakan kode etik prajurit Indonesia dan sekaligus penegasan bahwa TNI akan tetap menegakkan negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila.

Peristiwa demi peristiwa terus terjadi di Indonesia, baik yang berupa pemberontakan maupun yang berupa peristiwa-peristiwa politik seperti apa yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952, dimana parlemen memperdebatkan masalah-masalah Angkatan Perang, oleh pimpinan Angkatan Darat hal ini dianggap mencampuri urusan intern Angkatan Perang. Pada saat itu terjadi demonstrasi rakyat yang melakukan perusakan-perusakan di gedung DPR, kemudian menuju istana presiden dan meminta pembubaran parlemen. Pada saat itu juga pimpinan Angkatan Darat dan disertai serombongan perwira menghadap presiden Soekarno dan menghimbau pembubaran parlemen karena dipandang tidak representatif, dan agar segera diadakan pemilihan umum. Permintaan ini oleh presiden tidak dapat dipenuhi. Peristiwa tanggal 17 Oktober ini menyebabkan perpecahan di tubuh AD yang meluas sampai ke devisi-devisi di









dengan Orde Lama sedang setelah di keluarkannya surat tersebut Indonesia berganti nama dengan sebutan Orde Baru. Surat tersebut dikeluarkan pada tahun 1966 dari presiden Soekarno kepada Soeharto, surat itu dikeluarkan mengingat situasi pada saat itu sangat genting, isi dari surat itu "untuk atas nama Presiden/Pangti/Panglima Besar agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden /Panglima tertinggi/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPR demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pimpinan Besar Revolusi. Dari sini titik awal perjalanan Orde Baru. ( Moh. Mahfud MD., 1993; 61)

Adapun yang dimaksud dengan Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang didasarkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tuntutan perjuangan untuk melaksanakan UUD '45 secara murni dan konsekwen mengantarkan ke Sidang Umum ke IV, MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 6 Juli 1966 yang menghasilkan lebih dari 20 ketetapan dan keputusan. Demi keamanan dan pelaksanaannya, maka pada tanggal 6 Juni 1966 oleh pimpinan ABRI telah dikeluarkan suatu pernyataan yang



1. Penghancuran sisa-sisa kekuatan PKI dan meniadakan lahan subur bagi bangkitnya ideologi komunis di Indonesia.
2. Menciptakan stabilitas politik nasional sebagai prasyarat untuk melancarkan kampanye pembangunan.
3. Melancarkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai prioritas.
4. Melakukan reformasi kehidupan politik yang diawali dengan pembubaran PKI.
5. Penyederhanaan kehidupan kepartaian menuju ke pengendalian ideologi primordial oleh semua kekuatan sosial politik dan menggantinya dengan Pancasila selaku azas tunggal bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Mengembalikan masyarakat nasional ke masyarakat Pancasila.
7. Mengakhiri revolusi dan menggantinya dengan pengisian kemerdekaan.

Yang perlu disadari adalah pernyataan tugas pokok tersebut dilakukan dalam keadaan darurat dan tidak pernah ada pernyataan dari pemerintah maupun dari MPRS waktu itu. ( Soemitro, 1996; 70-71)

### C. ABRI Dan Politik

Memperoleh kekuasaan merupakan sesuatu didalam kehidupan politik, disamping mempertahankan kekuasaan

yang telah dimiliki. Mempertahankan ini tidak kalah pentingnya dengan sekedar memperoleh, karena, itu merupakan lanjutannya. Dalam hal ini tak terkecuali ABRI yang pasca Orde Lama ini berperan sebagai aktor utama dipentas politik Indonesia.

Munculnya militer dalam bidang politik di negara-negara berkembang tidak terlepas dari lemahnya para politisi sipil yang memegang kendali unsur-unsur kehidupan sebelumnya, sehingga relatif sering terjadi perpecahan didalam tubuh politisi sipil, karena mereka pada permulaan dilepas dari penjajahan asing tidak mampu mengembangkan integritas dan efektifitas. Hal ini dapat kita lihat dinegara-negara berkembang (bekas jajahan), elit amat menentukan proses kehidupan politik, maka apabila elit dipegang oleh sipil dan lemah akan mendorong politisi sipil kebelakang pentas politik.

Kelemahan-kelemahan politisi sipil dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia dapat kita lihat misalnya dari relatif mudahnya perpecahan ditubuh partai politik. Dalam keadaan seperti ini militer yang punya kelebihan secara organisatoris yaitu dalam hal hirarkhi, disiplin, komunikasi intern yang lancar dan esprit the corp menjadikan militer banyak berperan dalam bidang politik.

ABRI dalam hal ini banyak campur (intervensi)

dalam masalah politik hal ini disebabkan adanya banyak faktor yang mendorong ke arah itu, paling tidak untuk mengalihkan konflik-konflik tradisional yang memecah belah persatuan bangsa. (Arbi Sanid, 1993; 49-50)

ABRI dan politik di Indonesia merupakan dua hal yang sudah menyatu dalam kehidupan negara ini. Hal ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya negara ini. Asal-usul ABRI sangat menentukan pandangan, peranan dan tempatnya dalam masyarakat. ABRI merupakan angkatan bersenjata ciptaan ABRI sendiri dan sejauh ini ABRI melihat dirinya berada di atas politik dan proses-proses politik. (Bilveer Singh, 1996; 44)

Pada dasarnya semua militer di semua negara "berpolitik" dalam berbagai bentuk dan cara, tidak terkecuali di negara-negara demokrasi liberal. Lembaga ini tidak bisa dikurung di luar politik, karena identitas lembaganya, keotomiannya dan kekhasan fungsinya. Setiap angkatan perang mempunyai dampak pada politik, yang menjadi masalah itu bukan ada atau tidaknya peran politik golongan militer tetapi seberapa luas dan bentuk peran itu dijalankan. Di Amerika Serikat yang negara liberalpun juga tidak luput dari kenyataan itu walaupun peran (intervensinya) tidak langsung. (R. Hartono Cs, 1997; 34-35)

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pengamat politik Indria Samego bahwa militer di negara-negara

majupun tetap ikut dalam proses pembuatan kebijakan politik, seperti pembuatan kebijakan politik luar negeri dan pertahanan. Militer juga ikut dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara maju seperti dalam aktifitas civic mission untuk menaggulangi bencana alam atau lainnya walaupun ksdarnya tidak sebesar di negara-negara berkembang dalam politik dan sifatnyapun hanya sementara. (Indria Samego, 1998; 64-65)

Keterlibatan militer dalam politik ada beberapa bentuk, sebagai contoh seperti yang dikemukakan oleh Welek Jr. yang membedakan empat macam keterlibatan militer dalam politik yaitu : a. Pengaruh, b. partisipasi, c. penguasaan tanpa mitra, d. penguasaan dengan mitra. (Bilveer Shingh, 1996; 34-35)

#### **D. Keterlibatan ABRI Dalam Politik**

Dalam membahas keterlibatan militer dalam politik yang selalu muncul adalah pertanyaan mengapa militer terlibat dalam kehidupan politik ? secara sederhana ada dua pandangan yang saling berkaitan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pertama mereka yang melihat dari sudut obyektif atau faktor penarik. Disini yang dilihat adalah kegagalan politissi sipil dalam mengelola kehidupan sosial politik dan pembangunan ekonomi sehingga beberapa soal muncul, seperti korupsi dan kolusi,

kolusi, krisis legitimasi, instabilitas politik dan kebobrokan ekonomi. Hal-hal semacam ini yang mendorong militer tampil ke panggung politik untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Pandangan yang kedua melihat dari sudut subyektif atau faktor pendorong. Disini dilihat dari faktor-faktor di balik militer itu sendiri yang menyebabkan mereka tampil ke muka (panggung politik). Organisasi mereka yang modern, struktur komando yang ketat, semangat korp yang tinggi, serta julukan Dewa penyelamat negara dan penjaga idiologi serta konstitusi adalah alasan yang sering disebut atas keterlibatan militer dalam politik. (Laboratorium Ilmu Politik Fisip UI, 1997; 140)

Sementara keterlibatan ABRI dalam politik di Indonesia ini juga tidak terlepas dari sejarah berdirinya Indonesia yang mana dalam perang kemerdekaan ABRI sudah terlibat dalam bidang politik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hasnan Habib, bahwa peran militer dalam politik dimulai sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya tanggal 16 Agustus 1945 lebih kurang jam 07.00, Soekarno - Hatta sampai di Rengas Dengklok dikawal oleh Sukarni, Yusuf, Kunto dan beberapa anggota PETA dari Daidan Jakarta yang dipimpin oleh Shodanco (Letda) Singgih (kerjasama sipil dan militer).



Rombongan tersebut disambut dengan gembira oleh seluruh prajurit PETA Rengas Dengklok. Di asrama PETA itu, Bung Karno dan Bung Hatta diminta dengan sangat agar mereka bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat, karena keadaan dan saatnya sudah memuncak (... Terlihat silang pendapat antara golongan muda dan golongan tua).(Bilveer Singh, 1996; 27-28)

Pengakuan keterlibatan militer dalam politik di Indonesia secara resmi / de jure pada tanggal 16 Mei 1957 ketika presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional, dimana kondisi negara waktu itu tidak menentu yang akhirnya dimasukkannya personil ABRI dalam dewan formatur di Dewan Nasional tersebut yang pada waktu itu personil ABRI masuk didalam jajaran fungsional.

Setelah pembentukan Dewan Nasional ini peran ABRI (AD) dalam bidang non hankam semakin meningkat pesat, diantaranya dalam mengimbangi kekuatan partai-partai politik terutama PKI. Dalam rangka mengimbangi kekuatan-kekuatan tersebut ABRI (Dephankam) membentuk badan-badan kerja sama (BKS) antara militer sipil, diantaranya adalah BKS pemuda - militer, BKS ulama - militer dan lain-lain. (Leo Suryadinata, 1992; 11)

Peran ABRI dalam bidang non hankam semakin meningkat setelah demokrasi terpimpin yakni dengan banyaknya para perwira ABRI yang ditempatkan atau dikaryakan sebagai Menteri, Gubernur, Bupati, Direksi

perusahaan negara, Duta Besar dan lain sebagainya. Selain itu para perwira yang masih aktif berada dalam struktur organisasi ABRI juga memainkan peranan politik yang sangat penting dan langsung melalui badan-badan seperti pepelrada dan KOTI. (Syamsudin Haris, Riza Sihbudi, 1995; 98§)

Disamping dalam bidang-bidang eksekutif, keterlibatan ABRI dalam bidang politik yang mendapat legitimasi dengan adanya dwifungsi itu adalah dengan naiknya ABRI di DPR sejak tahun 1959 setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 sebagai tindak lanjut dari dibentuknya kabinet kerja satu (1) tanggal 10 Juli 1959 dimana didalamnya duduk delapan (8) orang personil perwira ABRI disamping kepala Staf Angkatan dan Polri yang duduk dalam kabinet secara ex officio. Dan saat dibentuknya DPR-GR tahun 1960 yang beranggotakan 283 orang, 35 orang diantaranya berasal dari golongan karya ABRI. (Soebijono Cs., 1995; 26)

Peran ABRI dalam bidang politik ini memang sejak ABRI lahir diawal kemerdekaan yang mana pada saat itu ABRI sudah tidak mau dikontrol oleh sipil. Keterlibatan ABRI dalam bidang politik dengan dwifungsinya ini didasarkan pada pernyataan A.H. Nasution pada pidatonya di dies natalis AMN pada tahun 1958 yang terkenal dengan konsep jalan tengah atau "the armies middle way" . Konsep jalan tengsn ini kemudisan dipertegas



dalam pembangunan juga ikut ambil bagian didalamnya, terutama pada masa awal Orde Baru, dan masa Orde Baru ini bisa dikatakan ABRI sebagai aktor utama dalam pembangunan. ABRI pada saat itu banyak berperan dipentas politik nasional, diantaranya dengan ditugaskannya ABRI dalam pembinaan wilayah yang dimaksudkan agar roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan wajar, begitu juga fungsi-fungsi masyarakat. Bahkan diharapkan bisa lebih baik. (Moh. Mahfud MD., 1993; 66-67)

Dalam prakteknya keikutsertaan ABRI dalam pembangunan bangsa ini terlihat dalam bidang-bidang yang didalamnya melibatkan personil ABRI seperti dalam bidang birokrasi, karena birokrasi menjadi alat pembangunan yang penting, tidak saja untuk tujuan teknis membantu formulasi dan realisasi kebijakan pembangunan, akan tetapi terutama untuk tujuan politik. Dalam rangka tujuan politik ini birokrasi Orde Baru mempunyai tiga ciri khas, yaitu :

1. Melakukan pembesaran jumlah anggota birokrasi secara kuantitatif.
2. Memberikan wewenang besar kepada birokrasi untuk menjadi kepanjangan tangan negara dalam mengontrol masyarakat, dan yang penting
3. memasukkan kekuatan militer kedalam birokrasi baik dipusat maupun didaerah.

Keterlibatan militer dalam birokrasi ini terlihat sangat besar, hal ini bisa dilihat dari penelitian Mac Dougall pada tahun 1982 yang menunjukkan prosentase ABRI dalam birokrasi lebih besar daripada sipil di departemen-departemen. Di departemen dalam negeri militer menempati 89 %, departemen luar negeri militer menempati 50 %, Departemen pertahanan keamanan menempati 100 %, departemen penerangan menempati 57 %, departemen keuangan menempati 30 %, departemen kehakiman menempati 50 %, departemen perdagangan dan koperasi menempati 38 %, departemen sosial menempati 57 %, departemen perhubungan 56 % dan beberapa departemen yang lain dari 17 departemen yang ditelitinya dan setelah 4 tahun kemudian penelitian Mac Dougall tidak menunjukkan adanya perimbangan antara militer dan sipil.

Disamping melalui jalur birokrasi ABRI dalam pembangunan ABRI juga berperan melalui jalur legislatif dengan menempatkan personil-personilnya (perwira) di MPR dan DPR melalui fraksi ABRI. ABRI juga terlibat dalam bidang ekonomi - bisnis, hal ini tidak terlepas dari peranannya sebagai kekuatan sosial politik, tetapi peranan ABRI dalam bidang ekonomi dan bisnis ini bukan semata-mata fenomena perluasan peran militer pada masa Orde Baru, karena ABRI sejak tahun 1957 sudah banyak terlibat dalam bidang ekonomi-bisnis yaitu sejak

Indonesia melakukan nasionalisasi ekonomi, dan dimasa Orde Baru ini praktek ekonomi-bisnis oleh militer semakin luas, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan atas nama militer, seperti : PT. Tri Usaha Bhakti milik Dephankam, induk-induk koperasi milik komando-komando militer dari semua angkatan dan kepolisian ; yayasan dharma putra milik Kostrad, PAN group, Pakarti group, dan berkat group milik "kelompok Opsus" dan PT. Propelat milik devisi Siliwangi serta berbagai BUMN yang strategis yang kepemimpinannya di distribusikan - entah itu direksi atau komisaris kepada perwira-perwira ABRI.

Peran ABRI dalam pembangunan yang tidak kalah pentingnya adalah peran yang berhadapan langsung dengan rakyat banyak, yaitu dengan programnya AMD (ABRI Masuk Desa) yang awalnya di instruksikan oleh M. Yusuf yang pada saat itu menjabat sebagai Pangab dan dalam perkembangannya kemudian dijalankan pula operasi-operasi teritorial yang memberi wadah kepada ABRI untuk ikut serta membantu merealisasikan program pembangunan langsung ditingkat bawah dan operasionalnya. (R. Eep Saefullah Fatah, 1994; 133-141)

Peran ABRI dalam pembangunan, terutama pada masa Orde Baru memang cukup besar, karena pada masa ini yang dikedepankan masalah ekonomi, dan peran ABRI selain dikemukakan diatas ada yang tidak kalah pentingnya



politik.

Para pendukung adanya dwifungsi ABRI (fungsi sospol) dalam argumennya tidak terlepas dari sejarah bangsa ini yang antara lain adalah :

1. Kegagalan para politisi sipil, memaksa ABRI untuk memainkan peranan sosial politik lebih besar.
2. Peran ABRI tetap menentukan karena merupakan kekuatan satu-satunya yang dapat menjamin bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi nasional.
3. ABRI dipandang sebagai penyelamat nasional satu-satunya mengingat banyaknya krisis negara yang telah dialami.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nugroho Notosusanto. Ia dengan jelas mengatakan bahwa :

....Seandainya fungsi sosial politik ABRI dicabut, dan ABRI hanya bertindak sebagai alat pemerintah lalu seandainya terjadi pergolakan politik dimana kekuatan-kekuatan sosial melawan satu sama lain karena kepentingan-kepentingan mereka sama sekali berbeda, apakah ada (kekuatan) potensial lain yang dapat memainkan peran sebagai moderator dan stabilisator?.(Bilveer Singh, 1996; 138)

Ali Moertopo juga menegaskan bahwa pernyataan dari para pimpinan ABRI telah memperjelas bahwa dwifungsi harus tetap ada. Dan ini dibenarkan oleh konstitusi...."Ali Moertopo berpendapat bahwa ABRI terpaksa menjadi kekuatan politik yang dominan karena "sampai sekarang (pada masa itu) karena kita belum mempunyai kelompok-kelompok politik sipil dengan program-program yang jelas dan kokoh. Namun ia





dalam negara

Ketiga, seandainya tidak ada dwifungsi ABRI, maka setelah kudeta tahun 1965, ketika TNI menjadi kekuatan yang handal, pihaknya dapat dengan mudah menjalankan kebijakan yang mengutamakan TNI. Akan tetapi kebijakan yang diambil sebaliknya.

Dan menurut analisa Jendral Sayidiman meskipun ada perubahan secara kualitatif dwifungsi akan tetap relevan bagi negara. (Bilveer Singh, 1996; 141-142) ✓

Tampaknya tidak semua perwira ABRI berpendapat bahwa ABRI harus terus aktif secara langsung dalam pemerintahan. Sebaliknya sementara perwira ABRI, termasuk yang sudah pensiun, mempunyai pandangan lain terhadap pelaksanaan dwifungsi. Bagi mereka, dwifungsi lebih merupakan sikap mental daripada strategi politik,

Sementara kelompok sipil ada yang menolak sama sekali dwifungsi ini. Bagi mereka doktrin ini sebetulnya bertujuan untuk melegitimasi dominasi militer dalam politik. Menurut pandangan ini konsep dwifungsi menghasilkan dikotomi antara militer dan sipil, sehingga memungkinkan militer berkuasa sedangkan ruang gerak sipil dalam politik dibatasi. (Syamsuddin Haris, Riza Sihbudi, 1996; 103-106)

Kelompok lain yang menentang ABRI mempunyai fungsi sosial politik, termasuk didalam kelompok penentang ini adalah A. H. Nasution yang merupakan

pencetus dari dwifungsi ABRI dengan konsep jalan tengahnya. Kegelisahan Nasution dalam hal ini berhubungan dengan cara dwifungsi (fungsi sospol) Angkatan bersenjata di interpretasikan dan diimplementasikan ketika Orde Baru mulai mengkonsolidasi kekuatannya dan mulai merasionalisasi kekuatan militer dalam negara, khususnya pada waktu seminar AD kedua. Karena itu pada tahun 1966 Nasution memperingatkan kawan-kawan sesama pejabat di SESKOAD bahwa ada suatu kebutuhan untuk "pemurnian makna dan implementasi" konsep dwifungsi. Dengan ini yang dimaksud Nasution adalah bahwa fungsi politik ABRI harus diimplementasikan sesuai dengan interpretasi atas bab II UUD 1945, yang berhubungan dengan perwakilan politik kelompok-kelompok fungsional. Menurut interpretasi Nasution atas bab II, seandainya ABRI akan memainkan peran politik juga seharusnya peran itu hanya di MPR dan bukan dalam politik negara sehari-hari. Dengan melakukan hal ini Nasution menyatakan bahwa "legitimasi peran politik ABRI tidak hanya berasal dari peran historisnya pada waktu revolusi tetapi lebih daripada itu, legitimasi itu akan mempunyai jaminan dari konstitusi".

Nasution juga mengkritik hubungan ABRI dengan partai-partai politik, karena ia yakin bahwa ABRI seharusnya berada di atas politik. Ia berkeberatan atas

hubungan dekat ABRI dengan GOLKAR, khususnya dalam pemilihan. Nasution mengimplikasikan bahwa cara Orde Baru mengimplementasikan dwifungsi angkatan bersenjata menempatkan ABRI dalam posisi yang sama seperti tentara kolonial Belanda dan hal ini bertentangan dengan posisi Sudirman di mana ABRI seharusnya tidak menjadi "alat mati" pemerintah.

Nasution menyatakan partisipasi angkatan bersenjata sebagai hal yang selaras dengan UUD 1945 yang menampung angkatan bersenjata sebagai kekuatan sosial politik, tetapi tentu saja tidak dalam jumlah sebagaimana sekarang (Masa itu), yang sebenarnya merupakan akibat dari kondisi transisi dan keadaan darurat. Nasution menyatakan bahwa meskipun ada konsensus dalam komisi negara pada tahun 1962 bahwa angkatan bersenjata harus ambil bagian dalam lembaga-lembaga politik "tetapi tidak dalam jumlah yang terlalu besar yang dapat mengubah pola-pola yang muncul dari pemilihan umum. (Bilveer Singh, 1995; 145-147)